

BAB IV

KEGAGALAN PROSES NEGOSIASI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perbedaan pandangan Hamas dan Fatah dalam memandang konflik dan resolusi damai dari Palestina dan Israel. Hamas dan Fatah menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan sehingga seringkali mengalami kebuntuan. Di sisi lain yang patut dipertimbangkan adalah perbedaan pandangan antara Fatah dan Hamas. Dua partai politik yang saat ini berpengaruh besar pada dinamika politik Palestina. Fatah yang menguasai Tepi Barat gencar mengupayakan upaya diplomasi oleh Presiden Mahmoud Abbas, di sisi lain Hamas yang menguasai Jalur Gaza justru tidak mempercayai hasil perundingan tersebut.

A. Pandangan Hamas terhadap Perjanjian Damai Palestina dan Israel.

1. Sejarah Hamas.

Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyah atau lebih dikenal dengan HAMAS bukanlah sebuah gerakan baru yang muncul pada 14 Desember 1987. Hamas merupakan bentukan baru dari Ikhwanul Muslimin yang berada di Palestina. Ikhwanul muslimin ialah sebuah gerakan islam modern dan salah satu gerakan islam terbesar di duniasaat ini dengan cabang gerakan berada pada lebih dari 70 negara¹.

¹ Mahfudz Siddiq, *Pemikiran dan Manhaj Politik Ikhwanul Muslimin*, Pustaka Tarbiatuna, Jakarta, 2003, Hal 1.

Perang Israel dan Palestina di tanah Palestina memunculkan actor-aktor perlawanan dari kalangan masyarakat di Palestina untuk membela Palestina. Gerakan perlawanan masyarakat Palestina memiliki keberagaman bentuk perlawanan. Perbedaan sifat perawana disebabkan oleh adanya perbedaan Ideologi atau pemahaman dalam memandang permasalahan Palestina. Perbedaan yang paling mendasar pada gerakan perdamaian Palestina adalah terdapat dua perbedaan yang mendasar yakni pergerakan yang didasari oleh keinginan damai dan pendukung jalan perundingan damai dan pergerakan yang tidak ingin adanya kompromi untuk mengusir Israel dari tanah Palestina meskipun harus mengangkat senjata dan mengobarkan perang. Hamas merupakan kelompok yang lebih memilih perang daripada duduk dalam meja perundingan dengan Israel. Hamas memandang bahwa perundingan damai hanya akan membuat Israel semena-mena terhadap Palestina. Pandangan Hamas bukan tanpa dasar, mereka mengacu pada terbuktinya tanah Palestina hanya disisakan di bagian Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Gerakan awal Hamas yakni Ikhwanul Muslimin telah memberikan perhatian pada tanah Palestina sejak awal pertama jatuhnya Palestina ke tangan Inggris dan dimulainya eksodus besar-besaran masyarakat Yahudi ke tanah Palestina. Pada tahun 1936, Ikhwanul Muslimin mendirikan cabang pertama di Haifa, gerakan tersebut menyedot sekitar 12 sampai 20 ribu orang. Gejolak politik pada tubuh Ikhwanul Muslimin terjadi pada tanggal 8 November 1948 ketika Ikhwanul Muslimin dianggap bertanggung jawab pada pembunuhan Perdana Menteri Mesir yakni Fahmi Naqrasyyi. Kejadian tersebut berimbas pada pembubaran Ikhwanul Muslimin di dunia, tidak terkecuali di Palestina. Ikhwanul Muslimin di Palestina mengganti nama menjadi "Jam'iyah Al Tauhid". Gerakan Jam'iyah Al Tauhid memfokuskan gerakan pada aktivitas dakwah, sosial dan pendidikan. Gerakan ini lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan kader-kader Palestina dimasa yang akan datang yang memiliki keyakinan tauhid

yang kuat. Mereka bergabung dengan militer Fatah namun hanya sampai pada tahun 1970 karena banyaknya perbedaan ideology dan ketidakcocokan diantara keduanya.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pergerakan Hamas muncul di Palestina. Pertama, Penolakan bangsa Palestina terhadap Israel.² Kedua, kebijakan diskriminatif Israel, Israel Hal ini menyebabkan Palestina banyak tertinggal dalam berbagai segi kehidupan baik pendidikan, sosial dan ekonomi. Bangsa Palestina menjadi warga negara kelas dua karena minimnya fasilitas hidup yang diperoleh dan ditambah lagi menjadi korban atas kebijakan sewenang-wenang Israel. Ketiga, Ketidakpuasan terhadap PLO (Organisasi Pembebasan Palestina). PLO dianggap semakin tak berdaya menghadapi tekanan Israel. PLO yang semula menempuh jalan bersenjata mengubah metode perjuangannya menjadi jalan damai, yaitu melalui meja perundingan. Hal ini terbukti tidak efektif, karena Israel berkali-kali melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan membuat kedudukan bangsa Palestina semakin tersudut.

Selain itu, PLO dan HAMAS memiliki perbedaan yang cukup mendasar.²⁶ Pertama, aspek ideologi. Ideologi PLO yang ditempuh adalah jalan sekuler, bergerak antara siklus nasionalisme, kebangsaan, dan kekirian. Sementara HAMAS memandang rakyat Palestina menghendaki Islam yang mereka anggap lebih berkemampuan untuk membangkitkan potensi-potensi umat, menyatukan dan merekrutnya melawan Zionisme dan para sekutunya. Kedua, metode perjuangan. Cara dan pendekatan PLO yang pragmatis yang terus diimplementasi untuk merespon tekanan-tekanan Barat dan “tuntutan-tuntutan waktu”, upaya untuk tetap eksis atas ideologi sekuler, walaupun harus mengorbankan prinsip-

² Akhmad Fauzi, Keberadaan Gerakan Hamas dalam perjuangan Kemerdekaan Palestina 1987-1991, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1995, Hal 31.

prinsip, dasar-dasar, dan hak-hak fundamental rakyat Palestina. Hal ini yang lambat laun harus mengkerdulkan tuntutan politis bangsa Palestina. Maka, dari upaya untuk memerdekakan Palestina dan mengusir penjajah Zionis berubah menjadi upaya demokratis yang mencakup bangsa Arab dan Zionis. Bahkan, menerima “hak” Zionis untuk menduduki 77% wilayah Palestina. Kemudian menyepakati pemerintahan otonom di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Sementara HAMAS sebagai gerakan masih terus merepresentasikan kekuatan perjuangan Palestina yang paling penting dan terus berjuang dengan senjata dan menganulir kompromi dari tanah Palestina walau sejelek.³

Cita-cita dan tujuan HAMAS secara lengkap tertulis di dalam Piagam HAMAS tahun 1988. Pada dasarnya, cita-cita dan tujuan HAMAS tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Ikhwanul Muslimin secara keseluruhan, yaitu mewujudkan kekuasaan Islam di seluruh dunia. Dalam konteks Palestina lebih bersifat lokal, yakni membebaskan Palestina dari cengkeraman Israel. Demi mencapai tujuannya, Hamas melakukan berbagai cara seperti membebaskan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tepi Barat dan Jalur Gaza secara de facto dikuasai oleh Israel setelah kemenangannya atas Negara-negara Arab tahun 1967. Sekalipun sudah ditandatangani Perjanjian Oslo atau Perjanjian Gaza-Ariha Pertama tanggal 13 September 1993 antara PLO dengan Israel yang meresmikan berdirinya Pemerintahan Otoritas Palestina melalui Pemilu dan menyepakati akan diberikannya Jalur Gaza dan Tepi Barat secara bertahap, namun HAMAS melihat perjanjian itu belum benar-benar membebaskan Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebab, kesepakatan itu justru semakin memantapkan kedudukan Israel di Palestina dengan diakuinya secara resmi keberadaan

³ Ahmad Thamrin Noer, *Perjuangan Mencari Bentuk Negara Palestina Antara Islamis dan Nasionalis*, Jurnal PKTTI UI Vol. IV, Jakarta, 2009, Hal. 41

Israel oleh PLO dan kemudian oleh Pemerintah Otoritas Palestina.

HAMAS yakin bahwa melawan pendudukan Israel adalah tugas yang legal, baik secara agama maupun undang-undang internasional. Karena itu, diperlukan legitimasi yang kuat dari dunia internasional terhadap sayap militer HAMAS sehingga memiliki kekuatan yang sangat besar untuk terus melakukan perlawanan terhadap Israel

2. Gerakan Perlawanan Hamas

Sebelum HAMAS menjadi partai politik, ada masa peralihan di mana hal ini ditandai dengan kembalinya Ikhwanul Muslimin ke lapangan untuk menghadapi Zionis Israel dengan mendirikan sebuah sayap militer yang bernama “Mujahid Palestina” (Mujahidun Filistiniyyun) di Jalur Gaza di bawah pimpinan Syekh Ahmad Yasin. Fase ini berlangsung pada 1981-1987. Hal ini dipicu oleh serangan membabi buta Israel terhadap PLO di Libanon dan pembantaian Shabra dan Shatilla oleh orang-orang Kristen Maronit dukungan Israel yang menewaskan lebih dari 700 warga Palestina. Beberapa kali terjadi bentrok senjata antara pasukan Mujahid Palestina dengan tentara Israel. Berdirinya sayap militer ini menunjukkan ketidakpercayaan Ikhwanul Muslimin kepada PLO beserta FATAH yang dianggap semakin melunak dan melemah di hadapan tentara Israel dan tekanan negara-negara pendukung Israel.⁴ Pada fase ini, gerakan HAMAS semakin solid, baik dari segi aspek tanzhim (organisasi) maupun ta’thir (ruang lingkup).⁴

Gerakan intifadah ini memiliki beberapa karakter yang menyebabkan gerakan ini menjadi begitu fenomenal. Pertama, terjadi serentak di seluruh Palestina. Maksudnya, seluruh

⁴ Pasukan itu Bernama Hamas (diakses dari <http://www.scribd.com>)

bangsa Palestina di setiap tempat, kota, desa, dan kamp-kamp, serentak melakukan Intifadah. Kedua, melibatkan seluruh kelompok bangsa Palestina: laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Perlawanan terhadap Israel tidak terbatas pada kelompok organisasi nasional atau kepartaian saja, tetapi dilakukan oleh seluruh rakyat. Artinya, setiap orang adalah pelaku intifadah. Ketiga, terjadi secara kontinu. Setiap hari terjadi bentrokan antara bangsa Palestina dengan tentara Israel. Keempat, berkarakteristik penuh keberanian dan pengorbanan. Hal ini ditandai dengan hampir setiap harinya tercipta syuhada. Kelima, warga yang berada di “dalam” wilayah yang terjajah (Tepi Barat dan Jalur Gaza) adalah pihak yang pertama mengambil inisiatif jihad ini.⁵

Keenam, para pelaku intifadah hanya bersenjatakan batu-batu dan ban-ban bekas. Sementara, pasukan Israel menghadapi mereka dengan berbagai perlengkapan senjata mutakhir. Namun, justru karena itulah masyarakat dunia memberikan simpatinya kepada bangsa Palestina. Ketujuh, Para pelaku Intifadah memiliki keyakinan agama (baca: Islam) yang kuat bahwa melawan kaum Zionis adalah bagian dari Jihad fi sabilillah. Dalam hal ini, mereka tentu lebih menderita dan dipandang lebih berani ketimbang para pejuang PLO yang lebih banyak berjuang dari “luar” dan menjalani kehidupan yang lebih “enak”.

Setelah berakhirnya intifadah I inilah Al-Majma' Al-Islami kemudian berubah namanya menjadi HAMAS. Secara resmi HAMAS didirikan di Jalur Gaza oleh Syekh Ahmad Yasin, dengan dikeluarkannya sebuah piagam pada 18 Agustus 1988. HAMAS kemudian memutuskan untuk mengikuti Pemilu Legislatif Palestina pada 25 Januari 2006.

⁵ Ikhrimah Shabri, “Palestina: Sejarah Perjuangan, Intifada, dan Agresi Israel terhadap Masjidil Aqsha” dalam *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru*, Editor: M. Riza Sihbudi dan Achmad Hadi, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1992, Hal. 103

Ada dua alasan utama yang menyebabkan HAMAS memutuskan menjadi Partai Politik.⁶ Pertama, HAMAS akan mampu bersama dengan yang lainnya, merealisasikan capaian-capaian esensial dan sikap Palestina di hadapan tekanan-tekanan luar, menanpikan perlawanan sebagai pilihan nasional, dan bekerja melalui perlawanan untuk sampai kepada perealisasiian kepentingan, tuntutan dan hak-hak bangsa Palestina. Kedua, Sebagaimana dinyatakan semua pemimpin HAMAS, maka masuknya gerakan dalam kehidupan politik akan menjadi semacam factor pendukung, penguat dan pemelihara pilihan perlawanan. Yaitu dengan menggunakan tombak politik sebagai panji kerja perlawanan dan pendukungnya.

Secara umum, berbagai aksi dan dan kegiatan yang dilakukan HAMAS terbagi pada dua bidang, yaitu bidang sosial keagamaan dan bidang politik militer. Pertama, bidang sosial keagamaan. Sebagai sebuah gerakan Islam yaeng memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan Islam, memakmurkan masjid-masjid menjadi salah satu aktivitas utama. Masjid digungsikan sebagai basis gerakan dan wahana untuk membangun karakter serta kepribadian masyarakat luas.

Seiring dengan kian maraknya agresi militer yang dilakukan oleh Israel, HAMAS kemudian mengembangkan berbagai bentuk perlawanan sipil. Bentukbentuk perlawanan sipil itu antara lain adalah demonstrasi, boikot, kerusakan missal, dan berbagai tindakan non kooperatif lainnya. Selain perlawanan-perlawanan sipil itu, para pejuang HAMAS dari Brigade Izzudin Al-Qassam tidak segan-segan untuk mengorbankan diri menjadi martir dalam perang melawan Israel. Operasi militer melalui “bom syahid” seakan menjadi

⁶ Anan Nurdin Lc (Editor), Gaza dalam Pelukan HAMAS: Kronologi Perjuangan Melawan Konspirasi Israel-Amerika dan Antek-anteknya, COMES, Jakarta, 2009, Hal. 13.

simbol dari keyakinan mereka bahwa mereka sedang menjalankan misi suci yang kelak akan dibalas dengan surga oleh Allah Swt.

B. Pandangan Fatah terhadap Perjanjian Damai Palestina dan Israel.

1. Sejarah Fatah.

Fatah (bahasa Arab: فتح "penaklukan") atau Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina, adalah sebuah partai politik di Palestina yang didirikan pada tahun 1958. Partai ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik Israel dan Palestina. Fatah sebenarnya secara teknis bukan merupakan partai politik, namun adalah faksi terbesar dalam PLO, sebuah konfederasi multipartai.

Fatah didirikan pada tahun 1958 atau 1959 oleh sekelompok warga Palestina yang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir; salah satunya Yasser Arafat. Setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, Fatah muncul sebagai kekuatan yang dominan dalam dunia politik di Palestina. Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO dan pada tahun 1969 menjadi pemimpin dalam PLO. Sejak saat itu, Arafat menjadi pemimpin PLO dan Fatah hingga meninggal dunia pada tahun 2004. Posisinya sebagai ketua Fatah digantikan Faruq al-Qaddumi. Kelompok ini terlibat konflik dengan kelompok Hamas setelah kemenangan kelompok Hamas pada Pemilu parlemen tahun 2006 lalu di Palestina.⁷

⁷ Wikipwdia, Fatah, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatah>

2. Gerakan Perdamaian Fatah

Fatah menjadikan PLO sebagai ujung tombang perdamaian di tanah Palestina dengan Israel. Sebagaimana kita ketahui, Kesepakatan Oslo dicapai setelah perundingan rahasia antara Yasser Arafat sebagai pimpinan PLO dan duet PM Israel mendiang Yitzhak Rabin dan Menlu Shimon Peres dari Partai Buruh. Penandatanganan dokumen kesepakatan itu dilakukan di Gedung Putih dengan Presiden AS Bill Clinton sebagai saksi. Saat itu, Benjamin Netanyahu sebagai ketua partai garis keras Likud menentang kesepakatan tersebut. Dan ketika Rabin tewas di tangan seorang pemuda Yahudi fanatik, Netanyahu naik ke kursi kekuasaan sebagai PM Israel yang baru. Ia pun enggan mengimplementasi kesepakatan itu dan meneruskan perundingan hingga tenggat waktu 5 tahun selesai. Biar begitu Kesepakatan Oslo tak bisa disingkirkan. PLO yang kemudian menjadi Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Arafat dan kemudian digantikan Mahmoud Abbas setelah Arafat meninggal, mencoba terus memelihara spirit Kesepakatan Oslo dengan terus memilih perjuangan melalui jalan diplomatik.

Langkah Abbas memohon MU PBB mengabulkan permohonan Palestina untuk mengakuinya sebagai negara merdeka sama sekali tidak melanggar Kesepakatan Oslo karena dokumen itu tidak mencantumkan larangan bagi langkah semacam itu. Kesepakatan perdamaian melalui perundingan yang menjadi substansi Kesepakatan Oslo tetap terpelihara. Langkah Abbas memohon pengakuan MU PBB mengakui kemerdekaan Palestina hanyalah strategi untuk memungkinkan Kesepakatan Oslo yang sempat mati suri dapat dihidupkan kembali.

C. Konflik Hamas dan Fatah

1. Kemenangan Hamas dalam Pemilu

Pasca ditandatangani perjanjian OSLO, terdapat berbagai konflik internal dalam palestina. Pada pemilu tahun 2006, pemerintahan Palestina dikuasai oleh Fatah dan PLO, hal ini disebabkan oleh belum ikutnya HAMAS dalam pemilu ini. Alasannya, HAMAS menganggap bahwa kedua pemilu ini adalah produk dari Kesepakatan Oslo pada tahun 1993. Kesepakatan Oslo, yang ditandatangani oleh Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat, merupakan buah dari berbagai perundingan yang dilakukan PLO dan Israel selama ini. Pada intinya, Kesepakatan Oslo menegaskan bahwa PLO akan menghentikan kekerasan perlawanan terhadap Israel dan demikian juga Israel. Di samping itu, Israel harus menarik mundur seluruh pasukannya dari Jalur Gaza dan Tepi Barat untuk kemudian membentuk pemerintahan otoritas Palestina di kawasan tersebut. Kesepakatan Oslo juga merupakan tanda berakhirnya cerita panjang tentang proyek pemerintahan otoritas Palestina yang timbul tenggelam seiring dengan pergantian pemerintahan di Israel.

Pada 1996, pemilu presiden dan anggota legislatif dilaksanakan pada 20 Januari 1996 di wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Pemilu ini dilaksanakan dalam situasi optimistis akan terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel. Pemilu kali ini sesungguhnya tidak menunjukkan legitimasi yang kuat. Dari sisi representasi, dapat dikatakan bahwa hasil pemilu tidak cukup memuaskan. Hal ini disebabkan kuatnya dominasi FATAH, sementara HAMAS dan Jihad Islam memutuskan untuk tidak ikut pemilu. Hal tersebut berimbas pada para pendukung HAMAS dan Jihad Islam yang tidak sedikit jumlahnya. Mereka pun memilih untuk tidak mengikuti pemilu. Bagi HAMAS dan Jihad Islam, pemilu tersebut memiliki cacat sejarah karena

merupakan produk dari Kesepakatan Oslo tahun 1993 yang cenderung merugikan dan mengkhianati perjuangan umat Islam Palestina⁸

Seperti yang sudah diperkirakan banyak pihak, FATAH memperoleh kemenangan mutlak dalam Pemilu Legislatif. Dari jumlah 88 kursi yang diperebutkan, sebanyak 55 kursi dikuasai oleh FATAH. Sementara sisanya diperoleh calon-calon independen non-partai. Hal yang sama juga terjadi dalam pemilu presiden. Yasser Arafat yang menjabat sebagai pemimpin FATAH dan PLO serta telah mempunyai pengalaman politik yang sangat matang, menang mudah atas rival rival politiknya. Ia mengantongi 88,2 persen suara, sedangkan Samiha Khalil sebagai saingan utamanya hanya memperoleh 11,5 persen suara.

Pada tanggal 11 November 2004 Yasser Arafat meninggal dunia. Kepemimpinan sementara dipegang oleh Rauhi Fattuh dari tanggal 11 November 2004 sampai 15 Januari 2006. Tugas utama Fattuh adalah menyelenggarakan pemilihan presiden segera Fattuh kemudian membentuk Komite Pusat Pemilihan Umum Palestina (Palestinian Central Elction Committee) untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan pemilu legislatif sekaligus. Pemilu presiden direncanakan Januari 2005, sedangkan pemilu legislatif pada bulan Juli tahun yang sama. Namun, karena berbagai kendala pemilu legislatif baru dilaksanakan satu tahun kemudian. Peta politik pada pemilu kali ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. FATAH masih dominan sedangkan HAMAS belum mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini. Akhirnya, Mahmoud Abbas yang diusung oleh FATAH sebagai kandidat calon presiden menang mutlak dengan meraih 62,52 persen suara.⁹

⁸ Tiar Anwar Bachtiar, *op.cit.*, Hal 142-143

⁹ Tiar Anwar Bachtiar, *op.cit.*, Hal 145-146

Pemilu 2006 merupakan pemilu legislatif yang seharusnya dilaksanakan pada Juli 2005. Pemilu 2006 ini membawa sejarah baru bagi Palestina, yakni keikutsertaan kelompok garis keras HAMAS untuk yang pertama kalinya. Keikutsertaan HAMAS tentu saja menuai pro dan kontra. Salah satu kelompok yang menentang keikutsertaan HAMAS dalam Pemilu adalah Jihad Islam. Jihad Islam tetap memboikot Pemilu seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pemilu kali ini tidak lagi menggunakan system distrik dengan block voting seperti pada Pemilu 1996, namun diganti dengan sistem paralel untuk mendapatkan jumlah proporsional. Jumlah kursi legislatif yang semula hanya 88 ditingkatkan menjadi 132 kursi dengan mempertimbangkan bertambahnya jumlah penduduk Palestina. Seluruh suara diperebutkan di 16 distrik, yaitu Yerusalem, Tubas, Qalqiya, Salfit, Nablus, Jericho, Ramallah, Jenin, Bethelam, Hebron, Gaza Utara, Gaza City, Deir Al-Balah, Khan Younis, dan Rafah.¹⁰

Hasil akhir pemilu ternyata menunjukkan keberpihakan mayoritas rakyat Palestina kepada HAMAS. HAMAS menguasai 74 kursi di legislatif, sementara rival terberatnya, FATAH, hanya memperoleh 45 kursi. Kemenangan HAMAS ini menurut beberapa pengamat disebabkan oleh beberapa hal, Pertama, turunnya popularitas FATAH di mata rakyat Palestina disebabkan karena isu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat FATAH. Issam Abu Isa, dalam artikelnya yang berjudul “Arafat’s Swiss Bank Account,” menguraikan lebih jauh perihal korupsi yang dilakukan oleh para pejabat PNA. Ia memaparkan bahwa sepulangnya dari tempat pengasingan di Tunisia, para tokoh FATAH justru hidup dengan harta benda yang kian bertambah. Mereka membangun vila-vila mewah di Gaza, Ramallah, Amman, dan sejumlah kota lainnya. Mereka juga mengirim anak-anaknya untuk bersekolah di luar negeri..

¹⁰ Ibid.

Kedua, selain faktor domestik, faktor internasional juga turut mempengaruhi kemenangan HAMAS dalam pemilu tersebut. Rakyat Palestina tampaknya juga sangat mempertimbangkan realitas politik kontemporer di Timur Tengah pasca peristiwa World Trade Center (WTC) 11 September 2001. Relitas tersebut terefleksi pada isu invasi yang dilakukan oeh AS ke Afghanistan dan Irak, konfrontasi AS dengan Suriah dan Iran, serta dukungan yang membabi buta kepada Israel.

Ketiga, popularitas HAMAS yang sangat besar karena kedekatannya dengan rakyat sejak masa-masa awal keberadaan Ikhwanul Muslimin di Palestina, yakni ketika Ikhwanul Muslimin memilih untuk bergerak di lapangan dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Jadilah HAMAS makin populis di mata rakyat Palestina.

Keempat, HAMAS berhasil menciptakan heroisme Palestina dengan gerakanperlawanan berenjatanya, khususnya setelah intifadah kedua(2000-2004). Kelima, sikap keras Israel terhadap para pemimpin HAMAS mampu menumbuhkan simpati dan soidaritas rakyat Palestina terhadap HAMAS. Terutama setelah terbunuhnya Syekh Ahmad Yasin pada 22 maret 2004 dan Rantisi pada 17 April 2004.

Kemenangan yang diperoleh HAMAS dalam Pemilu 25 Januari 2006 cukup mengagetkan banyak pihak, sekalipun polling-polling yang dilakukan sebelum pemilihan sedah memperkirakan bahwa HAMAS akan menjadi pesaing berat FATAH. Salah satu jajak pendapat yang dilakukan oleh Jerusslem Media and Communication Center (JMCC) memprediksi, FATAH yang telah mendominasi perpolitikan Palestina selama beberapa decade akan merapu 32,3 persen suara, sementara HAMAS 30,2 persen. Sementara Partai Palestina Independen akan berada di tempat ketiga dengan 12,6 persen suara. Sedangkan Front Pembebasan Rakyat

Palestina (PFLP) yang selama ini dikenal berhaluan keras diperkirakan meraih 7,6 persen suara.¹¹

2. Konflik Hamas-Fatah

Sebenarnya, sebelum membentuk kabinet pasca kemenangannya di pemilu, HAMAS menawarkan kepada FATAH untuk membentuk cabinet bersama. Namun, FATAH menyatakan keenggannya untuk bergabung dalam pemerintahan HAMAS. Akhirnya, HAMAS membentuk pemerintahan dengan Ismail Haniyah sebagai perdana menteri dan dilantik oleh Presiden Mahmoud Abbas pada 20 Februari 2006.

Keinginan untuk membentuk pemerintahan bersama antara FATAH dan HAMAS sangat sulit untuk direalisasikan. Hal ini disebabkan adanya tiga syarat yang diajukan oleh FATAH kepada HAMAS untuk membentuk pemerintahan bersama. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut¹²

Pertama, HAMAS diminta mengakui eksistensi Israel. HAMAS menolak syarat ini karena dinilai akan membawa berbagai implikasi luas. Salah satunya pengakuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa HAMAS untuk menerima Kesepakatan Oslo. Ini berarti Negara Palestina yang akan didirikan kemudian hanya akan terbatas pada Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kedua, HAMAS diharuskan mengakhiri perjuangan bersenjata. Syarat ini juga ditolak HAMAS karena melalui cara itulah HAMAS mendapat simpati dari rakyat Palestina; di samping karena perjuangan bersenjata juga memiliki daya dobrak yang dapat memaksa Israel untuk berunding dengan konsesi yang cukup besar. Ketiga, HAMAS

¹¹ "FATAH dan HAMAS Berebut Dukungan" Republika, 24 Januari 2006

¹² Bawono Kumoro, op. cit., Hal. 118-119

juga diwajibkan untuk mengakui semua perjanjian damai yang telah dibuat oleh FATAH dan Israel selama ini. HAMAS juga menolak hal ini karena secara ideologis tidak sesuai dengan ideology dan jalan perjuangan mereka. Belum tercapainya kesepakatan ketika itu dalam hal pemerintahan persatuan nasional menyebabkan terjadinya kebuntuan politik yang berkepanjangan di Palestina.

Puncaknya adalah ketika Presiden Mahmoud Abbas menyerukan rencana percepatan pemilu legislative dan presiden. Secara konstitusional, Abbas memang memiliki hak untuk membubarkan pemerintahan HAMAS dan mempercepat pelaksanaan pemilu. Namun, HAMAS menilai langkah Abbas tersebut sebagai sebuah paya kudeta terselubung terhadap pemerintahan HAMAS. Abbas berdalih bahwa inisiatif pemilu dini merupakan jalan keluar dari kebuntuan politik dan kondisi buruk akibat boikot internasional sejak HAMAS memenangi pemilu legislative.¹³

Potensi konflik antara FATAH-HAMAS semakin terbuka dengan adanya campur tangan Israel dan Amerika Serikat yang ikut membantu FATAH melawan Israel. Skema bantuannya adalah pasukan militer yang dimiliki Abbas akan diperkuat melalui latihan dan penambahan persenjataan. Karena dukungan Amerika itu didasari atas ketidak senangan Amerika terhadap Hamas. Penasihat Deputy Senior Urusan Keamanan Nasional AS, Elliot Abrams, mengumpulkan para penguasa Palestina di Gedung Putih. Abrams menyampaikan sikap Amerika yang tidak akan pernah berdamai dengan HAMAS dan akan terus berusaha dengan cara apa pun untuk menggulingkannya. Abrams pun menyebutkan bahwa Amerika telah memberikan bantuan persenjataan, amunisi, dan

¹³ "Negara Arab Serukan Konflik Fatah-Hamas diakhiri", Kompas, 19 Desember 2006. Hal. 11

pelatihan militer kepada tentara pesaing HAMAS, yaitu pasukan di bawah komando Mahmoud Abbas.¹⁴

Mencermati situasi yang makin tidak menentu di Palestina, Arab Saudi pun memutuskan untuk memfasilitasi pertemuan HAMAS dan FATAH guna mencari titik temu dalam membantu pemerintahan bersama. Kota Makkah dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan tersebut. FATAH diwakili oleh Mahmoud Abbas, sedangkan HAMAS diwakili oleh Khaled Meshaal. Akhirnya, melalui proses musyawarah yang disertai dengan komitmen kedua pihak untuk tidak kembali dari Mekah tanpa kata sepakat, perselisihan yang terjadi antara HAMAS dan FATAH mengenai pemerintahan persatuan nasional pun dapat diselesaikan secara damai. Kesepakatan tentang pemerintahan persatuan nasional pun tercapai pada 8 Februari 2007. Kesepakatan itu kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Makkah.¹⁵ Deklarasi Makkah ini dapat dilihat sebagai sebuah periode kedua transisi demokrasi Palestina menuju konsolidasi demokrasi pasca kemenangan HAMAS dalam pemilu legislative.

Namun sayangnya, Deklarasi Makkah yang telah disepakati oleh HAMAS dan FATAH tidak mampu membuat rujuk kedua gerakan politik terbesar di Palestina tersebut. Kondisi yang mulai tenang hanya bertahan beberapa bulan saja setelah Deklarasi Makkah disepakati. Deklarasi Makkah tidak mampu menjembatani perbedaan idologis yang begitu jauh di antara keduanya. Campur tangan Amerika melalui kaki tangannya di FATAH, Muhammad Dahlan, terus memprovokasi agar kembali terjadi pertikaian di antara FATAH dan HAMAS. Akhirnya, pada pertengahan Mei 2007 bentrokan di Jalur Gaza tidak dapat dicegah. Pertikaian terjadi tidak kurang dari 20 hari dan menewaskan lebih dari 50

¹⁴ Tiar Anwar Bachtiar, *Hamis Kenapa dibenci Israel?*, Hikmah, Jakarta, 2009., Hal. 189-190.

¹⁵ Bawono Kumoro, *op. cit.*, Hal. 120-121

orang dari kedua belah pihak. Tercatat beberapa kali bentrokan terjadi. Pada 17 Oktober 2007 Gaza kembali bergejolak. Terjadi pertikaian antara salah satu pendukung FATAH, Heles, dengan pasukan HAMAS. Bentrokan dengan kelompok yang sama terjadi lagi pada tanggal 20 Oktober 2007. Pada 12 November 2007, terjadi demonstrasi besar-besaran pendukung FATAH di Gaza City yang berakhir rusuh dengan pasukan keamanan HAMAS. Yang menarik, beberapa hari pasca pembentukan pemerintahan darurat, embargo ekonomi terhadap Palestina segera dicabut oleh Amerika Serikat, Israel, dan Negara-negara Barat lainnya. Namun hal itu hanya berlaku di Tepi Barat, sementara wilayah Jalur Gaza embargo tetap dilakukan. Israel juga mencairkan dana milik rakyat Palestina ke pemerintahan darurat di Tepi Barat, meskipun sesungguhnya seluruh rakyat Palestina berhak menikmati dana tersebut, termasuk rakyat yang berada di Jalur Gaza.¹⁶

D. Kurangnya Persiapan dan Perencanaan

Proses Perdamaian Oslo dimaksudkan untuk mengarah pada kesepakatan negosiasi akhir antara para pihak (Palestina dan Israel). Isu permanen seperti status Kota Al-Quds (Yerusalem), permukiman ilegal Yahudi-Israel, pengaturan keamanan, perbatasan internasional, dan hak-hak pengungsi Palestina yang tersisa untuk diselesaikan.

Kesepakatan Oslo dan berbagai kesepakatan damai telah menjadi acuan utama antara Palestina dan Israel. Tapi bukannya menjadi pelopor perdamaian permanen, kesepakatan damai itu dilihat oleh banyak orang Palestina sebagai sumber utama kelanjutan untuk mengekalkan penjajahan dan mempercepat kolonisasi Israel di wilayah Palestina.

¹⁶ 4 Faisal Assegaf, "Demi Sebuah Otoritas Semu," Koran Tempo, 12 Juli 2007. Hal. A11

Sebagai pemain utama dalam PLO, Fatah mendukung Kesepakatan Damai Oslo, sedangkan Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan terkait menolak untuk mengakui Israel dan tidak mewakili PLO, disinilah penyebab kegagalan Negosiasi Oslo yang mana hanya diwakili oleh PLO tanpa adanya perwakilan dari Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya.

Berikut fakta-fakta permasalahan yang terjadi dengan adanya Kesepakatan Damai Oslo:

1. Kesepakatan Perdamaian Bersifat Sementara

Kesepakatan-kesepakatan pada Kesepakatan Oslo dibuat sedemikian rupa hanya untuk mempromosikan perubahan bertahap. Dalam situasi tersebut, para perumus kesepakatan damai ingin memberikan para pemimpin waktu untuk meyakinkan publik dan untuk membangun kepercayaan mereka. Kesepakatan itu diperkirakan akan berlangsung tidak lebih dari lima tahun.

Sekarang, 20 tahun kemudian, mimpi buruk bagi Palestina bahwa kesepakatan damai yang hanya sementara akan menjadi permanen telah terealisasi. Tidak ada klausul dalam perjanjian untuk menangani masalah ini.

2. Tidak Adanya Kerangka Kerja

Tidak hanya merubah kesepakatan damai tersebut yang semula sementara menjadi permanen, namun sifatnya yang sementara memungkinkan perumus untuk menghindari beberapa masalah dasar yang seharusnya mengatur parameter keberhasilan kesepakatan. Isu-isu seperti perbatasan,

permukiman ilegal Yahudi, pengungsi Palestina, keamanan, dan Kota Al-Quds yang seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun itu tanpa titik referensi yang jelas di mana negosiator masa depan akan terikat.

Tidak adanya kerangka kerja juga meninggalkan jelas status daerah yang dijajah pada tahun 1967, sehingga warga Palestina tidak bisa dan masih tidak dapat menuntut bahwa Israel memperlakukan wilayah tersebut sebagai wilayah yang dijajah, meskipun seluruh dunia melihat mereka seperti itu.

3. Perluasan Permukiman Ilegal Yahudi Terus Berlanjut

Sementara perunding Palestina mengatakan telah mencoba untuk memenangkan penghentian semua pembangunan permukiman ilegal Yahudi-Israel selama periode kesepakatan damai yang sementara.

Namun, mereka gagal untuk mendapatkan komitmen tersebut dan dengan periode sementara itu yang diperpanjang selama dua dekade tanpa kerangka kerja apapun, Israel menikmati kebebasan dalam membangun permukiman ilegal yahudi di mana pun dan kapan pun mereka inginkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

Kini kehidupan bagi jutaan warga Palestina lebih buruk dibandingkan 20 tahun yang lalu, saat pemerintah penjajah Israel telah memperluas permukiman ilegal Yahudi yang dikendalikan di lebih dari 42 persen tanah Palestina yang diduduki dan meningkatkan kontrol atas tanah dan kehidupan penduduk Palestina.

Jumlah pemukim ilegal Yahudi pun yang hidup di wilayah-wilayah pendudukan dua kali lebih banyak dibandingkan jumlah pemukim ilegal Yahudi yang tinggal di

sana pada tahun 1993, dari 260.000 jiwa menjadi lebih dari 520.000 jiwa. Hal itu menandakan bahwa populasi pemukim ilegal Yahudi tumbuh sekitar 10.000 jiwa per tahun.

Sementara Badan Meteorologi Palestina memperingatkan pola yang sama sudah muncul selama perundingan damai antara Otoritas Palestina dengan Israel yang kini sedang berlangsung. Dalam enam pekan terakhir, Israel telah menyetujui pembangunan setidaknya lebih dari 3.600 unit rumah permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat dan Al-Quds Timur serta menghancurkan setidaknya 36 rumah milik warga Palestina.

Dalam 20 tahun terakhir, Israel telah menghancurkan 15.000 bangunan milik Palestina, termasuk rumah, sistem air, dan fasilitas pertanian.

Palestina menginginkan Israel menarik diri dari semua tanah yang diduduki sejak tahun 1967 dan untuk membongkar semua permukiman ilegal Yahudi, meskipun mereka telah menerima prinsip pertukaran lahan kecil dalam ukuran dan nilai yang sama.

Hingga kini, Palestina menginginkan pembekuan semua pembangunan permukiman ilegal Yahudi selama perundingan damai.

4. Status Al-Quds (Yerusalem)

Karena perbedaan pendapat sangat besar atas status Kota Al-Quds, para pihak sepakat untuk menunda diskusi tentang kota suci dan penduduknya hingga pembicaraan status permanen yang akan disimpulkan dalam waktu lima tahun setelah Kesepakatan Damai Oslo.

Israel merebut Al-Quds Timur dari Yordania pada tahun 1967 dan kemudian mencaploknya dalam tindakan yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Israel menganggap Kota Al-Quds sebagai ibukota “abadi dan tak terpisahkan”. Sementara rakyat Palestina ingin menjadikan Al-Quds Timur, rumah bagi sekitar 280.000 warga Palestina, ibukota negara masa depan mereka.

Tanpa kerangka kerja dan dengan pembicaraan yang gagal menghasilkan kesepakatan, Israel, meluluskan hukum sendiri di Al-Quds Timur yang dianggap tindakannya berlaku de facto dan sejak berhasil mengisolasi kota dengan dinding pemisah dengan tinggi 10 meter serta puluhan pos pemeriksaan didirikan di sekeliling kota tersebut.

Kebijakan administratif juga menyebabkan hilangnya kewarganegaraan ribuan Jerusalemites (penduduk pribumi Al-Quds) Palestina dan kebijakan Israel tentang penodaan terhadap tempat-tempat suci, terutama Masjid Al-Aqsha, terus berlanjut.

5. Pembagian Area A , B dan C di Tepi Barat

Pembagian daerah pendudukan Palestina ke dalam klasifikasi yang berbeda, sekali lagi, dalam kesepakatan Damai Oslo dimaksudkan untuk bersifat sementara. Kesepakatan itu menyebabkan terciptanya Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) yang bertanggung jawab atas administrasi suatu wilayah di bawah kekuasaannya.

Pada tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C, memecah wilayah Tepi Barat dan membatasi kedaulatan Palestina. Pada area A, Otoritas Palestina menguasai kontrol penuh keamanan dan administratif sipil. Namun, Israel telah mengingkari area A, di mana dalam kesepakatan itu penduduk Palestina diberikan keamanan

eksklusif dan hak administratif. Hingga kini, serangan lanjutan ke kota-kota berpenduduk mayoritas Palestina telah membuat pasukan keamanan Palestina terlihat seperti kaki tangan Israel.

Sementara di dalam Area B, Otoritas Palestina hanya memiliki kontrol administratif sipil, namun sektor keamanan dikontrol oleh Pemerintah penjajah Israel. Di area C, lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat, pemerintah penjajah Israel mempertahankan kontrol penuh administratif sipil dan keamanan. Pengembangan penduduk Palestina di daerah ini benar-benar terhambat. Hanya kurang dari satu persen wilayah tersebut tersedia untuk pengembangan Palestina dan lebih dari 94 persen aplikasi izin mendirikan bangunan bagi penduduk Palestina telah ditolak dalam beberapa tahun terakhir.

6. Mekanisme Penegakan

Salah satu celah terbesar dalam Persetujuan Oslo adalah tidak adanya jalan lain jika salah satu pihak menolak untuk melaksanakan komitmen kesepakatan. Meskipun nota kesepahaman ditandatangani di Washington, tidak ada pihak ketiga yang resmi termasuk yang bisa menjamin efektivitas kesepakatan atau menjamin pelaksanaannya. Tidak ada sanksi yang diterapkan kepada pihak yang menolak untuk menegakkan setiap elemen kesepakatan, meninggalkan kekuasaan semata-mata di tangan penjajah, yang mengontrol hampir semua aspek kehidupan Palestina dan mampu mengabaikan elemen yang mereka pilih tanpa hukuman apapun.

7. Pengungsi Palestina

Ada sekitar lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar, sebagian besar keturunan dari 760.000 orang Palestina yang melarikan diri atau diusir ketika negara Zionis 'Israel' diciptakan pada tahun 1948. Selain itu, ratusan ribu warga

Palestina terpaksa menjadi pengungsi dan tinggal di kamp-kamp pengungsian di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Ratusan penduduk Palestina juga masih mengungsi di Gurun Negev karena pasukan Israel mengusir mereka keluar dari rumah mereka, namun mereka masih berupaya kembali kepada kampung halaman mereka dengan mengklaim hak untuk hidup di tanah yang mereka warisi dari kakek-kakek mereka.

Rakyat Palestina menuntut Israel mengakui “hak kembali” mereka, tapi selama perundingan damai menuntut Israel mengakui “prinsip” dari hal itu dan dengan demikian harus bertanggung jawab atas masalah tersebut. Namun, Israel menolak permintaan untuk memenuhi “hak kembali” Palestina. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menginginkan Palestina menerima Israel sebagai “negara orang Yahudi,” yang akan memastikan masalah pengungsi diselesaikan dalam batas-batas negara Palestina pada masa depan.

Sementara PLO terutama menganggap dirinya sebuah gerakan yang diluncurkan oleh dan untuk para pengungsi, perjanjian tersebut hanya merujuk pada kasus mereka sebagai salah satu isu permanen status tanpa kerangka kerja atau titik referensi seperti Resolusi PBB 194.

8. Hubungan Ekonomi

Protokol Paris yang berasal dari Kesepakatan Oslo sangat bermanfaat bagi perekonomian Israel dan bisnis di Israel. Israel terus mengontrol masuknya barang yang ditujukan untuk wilayah Palestina, mengumpulkan cukai atas produk yang dialokasikan untuk Palestina. Produsen Israel juga terus menikmati monopoli pada pasar Palestina.

Tindakan selama 20 tahun terakhir telah menghambat ekonomi Palestina dengan kerugian dana ratusan juta dolar per tahun. Perekonomian di Jalur Gaza sendiri telah alami kehilangan dana sekitar 76 juta dolar per tahun hingga di atas 35 persen lahan pertanian yang dicegah untuk dibudidayakan.

Selain itu, pemerintah Israel telah mengurangi wilayah perairan yang tersedia untuk nelayan Palestina dari 20 mil laut yang disepakati pada Kesepakatan Damai Oslo, kini hanya enam mil laut. Ekspor dari Jalur Gaza mengalami penurunan hingga 97 persen sejak blokade ekonomi itu diberlakukan pada tahun 2007.

9. Pembatasan Gerakan

Meskipun Kesepakatan Oslo mencakup ketentuan kehadiran polisi Palestina permanen di semua penyeberangan perbatasan. Israel mengingkari kesepakatan tersebut setelah meletusnya Intifadah (perlawanan) Kedua pada bulan Oktober 2000. Meskipun komitmen untuk kembali pada status pra-2000, Israel belum melakukannya, bahkan setelah peluncuran perundingan damai saat ini.

Kegagalan Kesepakatan Oslo menciptakan dasar meletusnya Intifadah Kedua, yang menewaskan ribuan orang, mayoritas warga Palestina. Bentrokan antara militan Palestina di Jalur Gaza dan pasukan Israel terus membunuh dan mengancam warga sipil di kedua belah pihak.

Saat ini, Israel mendirikan ratusan pos pemeriksaan dan terus bertambah sampai sekarang. Pada awalnya, hanya puluhan pos pemeriksaan militer Israel yang didirikan di Tepi Barat, kini setidaknya 520 pos pemeriksaan militer didirikan Israel di daerah tersebut. Pos-pos pemeriksaan membagi kota

dan desa Palestina menjadi kanton kecil, membatasi pembatasan warga Palestina dan membuat hidup sangat sulit.

Sebuah sistem pemeriksaan dan pembatasan lainnya pada pergerakan dan perdagangan warga Palestina juga telah memisahkan masing-masing anggota keluarga dan menghancurkan perekonomian Palestina.

10. Kelangkaan Pasokan Air

Israel menguasai sebagian besar sumber daya air bawah tanah di Tepi Barat. Sedangkan Rakyat Palestina menginginkan bagian yang lebih adil. Israel menguasai 80 persen sumber air Palestina dan sekitar 520.000 pemukim ilegal Yahudi menggunakan sekitar enam kali jumlah air yang digunakan sekitar 2,6 juta warga Palestina di Tepi Barat.

Kebanyakan permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat terletak dekat dengan sumber air, di mana penduduk Palestina dibatasi untuk mengakses sumber air tersebut. Pemukim ilegal Israel di Lembah Yordan menggunakan air dalam jumlah besar untuk mengairi hasil pertanian, sementara petani Palestina berjuang untuk mengairi tanaman mereka di tengah penyerangan ekstrimis Yahudi dan pasukan penjajah Israel.

Dalam Kesepakatan Damai Oslo, ada kesepakatan pendirian Komite Air Bersama untuk mengelola pembagian sumber air di Tepi Barat. Komite bersama itu terdiri dari jumlah yang sama antara pihak Palestina dan Israel, pada kenyataannya secara efektif memberikan Israel hak veto eksklusif atas sumber air dan pembangunan infrastruktur di Tepi Barat.

11. Perjalanan Aman Jalur Gaza-Tepi Barat

Pergerakan orang dan barang termasuk poin yang disepakati dalam Kesepakatan Damai Oslo. Namun, isu itu tidak pernah dilaksanakan. Sebuah akhir upaya oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice untuk menghidupkan kembali perjanjian itu tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Israel.

Menurut statistik yang dikeluarkan lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, lebih dari 7.000 jiwa warga Palestina dibunuh penjajah Israel sejak Kesepakatan Damai Oslo.

12. Dinding Apartheid

Tembok 'keamanan' Israel memang tidak disebutkan dalam Kesepakatan Damai Oslo. Namun, tidak adanya kesepakatan mengenai perbatasan memberikan keleluasaan Israel untuk membangun dinding pemisah rasis di wilayah Palestina secara ilegal.

Dinding apartheid yang membentang dengan panjang 441 mil itu dibangun di atas tanah Palestina berdasarkan kepentingan Israel untuk melindungi para pemukim ilegal Yahudi dengan menciptakan pemisah antara pemukim ilegal Yahudi yang bebas untuk bergerak masuk dan keluar dari permukiman ilegal di wilayah yang diduduki dan wilayah Palestina saat ini dengan penduduk Palestina yang dibatasi akses keluar masuk perbatasan.

Tujuan dibangun dinding apartheid Israel juga untuk memperkuat perbatasan dan perluasan di Kota Al-Quds. Meskipun pihak Palestina mencari nasihat hukum mengenai ilegalitas dinding apartheid itu ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, namun Israel menolak untuk mengalah pada lokasi dinding yang dibangun itu.

13. Administrasi Sipil

Sementara Kesepakatan Oslo berbicara mengenai perlunya untuk membubarkan pemerintahan sipil Israel, antara lain, izin untuk mendirikan bangunan permukiman ilegal di area C, tidak pernah terjadi.

14. Blokade Gaza

Kesepakatan Oslo menyatakan bahwa Jalur Gaza dan Tepi Barat merupakan entitas tunggal. Para pejabat internasional telah berulang kali mengatakan bahwa mereka mendukung negara Palestina merdeka yang berdaulat. Penarikan sepihak Israel dari Jalur Gaza merupakan upaya mengisolasi dan memblokade Jalur Gaza. Israel tidak membuat jaminan dalam Kesepakatan Damai Oslo tentang kelangsungan masalah ini, bahkan menghancurkan bandara serta pelabuhan Jalur Gaza sebagai hukuman atas kemenangan gerakan Islamis Hamas pada 2006 dan perlawanan gerakan itu terhadap penjajahan.

Kurangnya penegakan perjanjian perbatasan dan klausul aman Jalur Gaza-Tepi Barat hanya memperketat blokade Jalur Gaza dan mengancam kehidupan 1,8 juta penduduknya.

15. Masalah Komunikasi

Kesepakatan Oslo memasukkan ketentuan yang menyerukan pembentukan sebuah komite teknis bersama untuk menyelesaikan masalah komunikasi.

Komite bersama tersebut jarang bertemu dan meskipun ada pertemuan, hanya sedikit kesepakatan yang dihasilkan tentang isu-isu yang dibahas. Israel mempertahankan veto de facto daya pada semua perkembangan telekomunikasi. Sebagai contoh, Israel telah menolak untuk memungkinkan pengembangan komunikasi selular 3G untuk perusahaan seluler nasional Palestina, Jawwal.